



KABUPATEN LAMONGAN



LAPORAN PENGLOLAAN RESIKO TRIWULAN IV

2025



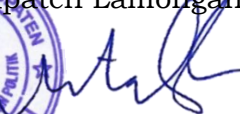

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Lamongrejo Nomor 92 Lamongan Kode Pos (62217)
Telepon (0322) 321706 E-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id/bakesbangpol/

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	31 DESEMBER 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan  <u>NURHAYATI AS'ADAH, S.E., M.Si.</u> 19730402 199901 2 001
Diperiksa	:	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan  <u>MOHAMMAD ANDI SUWIJI, SH, MM.</u> 19690817 200312 1 007
Disahkan Oleh	:	Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan   <u>Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP</u> 19760410 199412 1 002

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Risiko selalu timbul dari segala aspek kehidupan dan bersinggungan langsung dengan sosial masyarakat. Informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat menjangkau dan berinteraksi secara bebas, tentunya dapat memunculkan delik negatif yang menggerus nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disadari dan dipatuhi oleh masyarakat. Keberlanjutan nilai sosial, budaya, dan politik perlu dipertahankan dengan asas gotong royong dan

kebersamaan, baik antar masyarakat sendiri maupun antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi sinergi positif yang dapat meminimalisir ataupun menghilangkan resiko.

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan menjadi sarana untuk mendapatkan informasi, pelayanan, dan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Program yang direncanakan dan diimplementasikan selalu berkaitan erat dengan kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV, Resiko strategis yang telah dilaksanakan adalah Peningkatan sistem pengamanan diwilayah dengan Mengedepankan unsur 3 pilar dan Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang sekaligus Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang. Resiko Oprasional yang sudah dilaksanakan adalah Melakukan Monev triwulanan sedangkan yang belum dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran 1.2.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam pengelolaan risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan masih munculnya resiko konflik sosial karena konflik bersifat fluktuatif. Dengan kata lain, konflik sosial tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi namun bisa diantisipasi/deteksi dini dan ditangani agar konflik tidak semakin besar serta adanya penanganan pasca konflik.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP,

keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, sehingga RTP dapat direalisasikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV dapat disimpulkan bahwa resiko dapat dikendalikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko. Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan peningkatan kewaspadaan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan konflik.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Triwulan III

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:						
1	Peningkatan sistem pengamanan di wilayah dengan Mengedepankan unsur 3 pilar: 1. Tertib administrasi kependudukan 2. Tamu wajib lapor 1 x 24 jam 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal	Monitoring Renaksi	Kepala Badan	Januari-Desember	Januari-Desember	Setiap Bulan
2	Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Parpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat serta memasang iklan pemilu menjelang pesta demokrasi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Badan	Juli 2025	Juli 2025	-
3	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Reviu hasil monev kinerja internal	Kepala Badan	Triwulan I s/d IV Tahun 2025 (Maret, Juni, September Desember)	Triwulan I s/d IV Tahun 2025 (Maret, Juni, September Desember)	-
Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:						
1	Membentuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Triwulan IV (Desember)	Triwulan IV (Desember)	-
2	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Oktober 2025	Oktober 2025	-
3	Mengintensifkan pembinaan kepada penghayat kepercayaan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	November 2025	November 2025	-
4	Menghimbau kepada Ormas agar melaporkan keberadaannya melalui Camat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Desember 2025	Desember 2025	-
5	Membentuk Timdu Ormas	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Oktober 2025	Oktober 2025	-
6	Melakukan sistem reward dan punishment terhadap pegawai berprestasi ataupun pegawai yang menyimpang	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Desember 2025	Desember 2025	-
7	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Politik Kaum prempuan di seluruh Kecamatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Oktober 2025	Oktober 2025	-
8	Melakukan Monev Triwulan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September Desember)	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September Desember)	-
9	Koordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Oktober 2025	Oktober 2025	-
10	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Oktober 2025	Oktober 2025	-
11	Sosialisasi kepada ASN	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Oktober 2025	Oktober 2025	-
12	Melakukan verifikasi berjenjang	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Oktober 2025	Oktober 2025	-
13	Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Oktober 2025	Oktober 2025	-
14	Rekrutmen SDM yang memadai	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Desember 2025	Desember 2025	-
15	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Desember 2025	Desember 2025	-

Lampiran 1.2 Monitoring Risiko Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Tahun Penilaian	2025									
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan										
Dinas Terkait	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik									
Kejadian Risiko										
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak	Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:										
1	Majemuknya Potensi Konflik dapat terjadi sewaktu waktu	RSO.25.05.06.01	21 November 2025	Akuisisi mayoritas saham PSIS Semarang oleh Datu Nova Fatmawati, istri dari CEO Persela Lamongan Fariz Julinar Maurisal, memicu gejolak di kalangan pendukung fanatik Laskar Joko Tingkir.	Melukai kepercayaan serta komitmen manajemen terhadap Persela	Sudah dilakukan mediasi	Peningkatan sistem pengamanan di wilayah dengan Mengedepankan unsur 3 pilar: 1. Tertib administrasi kependudukan 2. Tamu wajib lapor 1 x 24 jam 3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang yang tidak dikenal	Januari-Desember	Januari-Desember	Setiap Bulan
2	Tingginya angka golput masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu	RSO.25.05.06.02	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Parpol, Ormas, Mahasiswa untuk memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat serta memasang iklan pemilu menjelang pesta demokrasi	Juli 2025	Juli 2025	-
3	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.25.05.06.03	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Triwulan I s/d IV Tahun 2025 (Maret, Juni, September Desember)	Triwulan I s/d IV Tahun 2025 (Maret, Juni, September Desember)	-
Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:										
1	Terlambatnya penanganan konflik	ROO25.05.06.01	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Membentuk FKDM sampai dengan tingkat Kecamatan dan Desa	Triwulan IV (Desember)	Triwulan IV (Desember)	-
2	Masih tertanam faham-faham radikal dan intoleran	ROO25.05.06.02	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Oktober 2025	Oktober 2025	-
3	Belum terinventarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan	ROO25.05.06.03	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Mengintensifkan pembinaan kepada penghayat kepercayaan	November 2025	November 2025	-
4	Belum terinventarisasi keberadaan ormas secara menyeluruh	ROO25.05.06.04	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Menghimbau kepada Ormas agar melaporkan keberadaannya melalui Camat	Desember 2025	Desember 2025	-
5	Resiko Kemitraan: Kegiatan Ormas (Kemitraan) memicu sensitivitas kelompok masyarakat tertentu, misalnya isu SARA atau dukungan politik tertentu	ROO25.05.06.05	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Membentuk Timdu Ormas	Oktober 2025	Oktober 2025	-
6	Resiko Fraud: Pemberian imbalan atau hadiah/gratifikasi agar didahulukan/dipermudah dalam proses pelayanan atau pengurusan dokumen	ROO25.05.06.06	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Melakukan sistem reward dan punishment terhadap pegawai berprestasi ataupun pegawai yang menyimpang	Desember 2025	Desember 2025	-
7	Minimnya pemahaman tentang gender kaum perempuan	ROO25.05.06.07	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Pemerataan Sasaran Sosialisasi Politik Kaum perempuan di seluruh Kecamatan	Oktober 2025	Oktober 2025	-
8	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan	ROO25.05.06.08	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Melakukan Monev Triwulan	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September Desember)	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September Desember)	-
9	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO25.05.06.09	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Koordinasi dengan inspektorat terkait Laporan Pertanggungjawaban yang kurang tepat	Oktober 2025	Oktober 2025	-
10	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO25.05.06.10	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Melakukan sosialisasi/bimtek dan pelatihan kepada ASN	Oktober 2025	Oktober 2025	-
11	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO25.05.06.11	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Sosialisasi kepada ASN	Oktober 2025	Oktober 2025	-
12	Resiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/ jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO25.05.06.12	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Melakukan verifikasi berjenjang	Oktober 2025	Oktober 2025	-
13	Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	ROO25.05.06.13	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Koordinasi dengan BPKD terkait penganggaran	Oktober 2025	Oktober 2025	-
14	Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan	ROO25.05.06.14	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Rekrutmen SDM yang memadai	Desember 2025	Desember 2025	-
15	Sarana dan prasarana kurang memadai	ROO25.05.06.15	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Koordinasi dengan Aset terkait pengadaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	Desember 2025	Desember 2025	-

Lampiran 1.3 Daftar Risiko Prioritas Unit Kerja

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Majemuknya Potensi Konflik dapat terjadi sewaktu waktu	RSO.25.05.06.01	14	Kepala Badan	Adanya perbedaan antar individu dan kelompok	Majemuknya konflik dan berkelanjutan sehingga menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tingginya angka golput masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu	RSO.25.05.06.02	13	Kepala Badan	Sasaran pendidikan politik belum dilakukan secara menyeluruh	Kesadaran politik masyarakat masih rendah
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.25.05.06.03	8	Kepala Badan	Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	Kurang efektif dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi
Risiko Operasional OPD							
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tertambatnya penanganan konflik	ROO25.05.06.01	7	Kebid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	FKDM belum terbentuk sampai ditingkat Kecamatan dan Desa	Kurang cepat dan akuratnya upaya Deni & Ceni
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Masih tertanam faham-faham radikal dan intoleran	ROO25.05.06.02	6	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Belum menyeluruhnya sasaran sosialisasi wawasan kebangsaan	Berkembangnya faham-faham radikalisme di masyarakat
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum terinventarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan	ROO25.05.06.03	7	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Kurang optimalnya sosialisasi terhadap PB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri	Data Penghayat kepercayaan tidak terdeteksi sehingga timbulnya kegiatan penghayat kepercayaan yang meresahkan masyarakat karena tidak ada pengawasan
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum terinventarisasi keberadaan ormas secara menyeluruh	ROO25.05.06.04	8	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Banyaknya Orkesmas/Yayasan dan LSM yang belum melaporkan keberadaannya	Timbulnya kegiatan Ormas, Orpem, dan LSM yang bertentangan dengan Pancasila karena tidak ada pengawasan
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Kegiatan Ormas (Kemitraan) memicu sensitivitas kelompok masyarakat tertentu, misalnya isu SARA atau dukungan politik tertentu	ROO25.05.06.05	8	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pihak Ormas	Kurang fahamnya ormas atas tupoksinya sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah	Gangguan stabilitas daerah
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Pemberian imbalan atau hadiah/gratifikasi agar didahulukan/dipermudah dalam proses pelayanan atau pengurusan dokumen	ROO25.05.06.06	4	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kebiasaan masyarakat untuk memberikan hadiah sebagai ucapan terimakasih	Ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen pelayanan publik
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Minimnya pemahaman tentang gender kaum perempuan	ROO25.05.06.07	6	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kurangnya kepedulian terhadap peningkatan kesadaran politik kaum perempuan	Peran perempuan dalam partisipasi politik kurang
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum optimalnya kualitas laporan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan	ROO25.05.06.08	9	Sekretaris	Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar lintas bidang terhadap pelaporan serta movev pelaksanaan kinerja dan anggaran kegiatan	Pencapaian laporan yang tidak tepat waktu
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum optimalnya kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan	ROO25.05.06.09	9	Sekretaris	Kurangnya Pemahaman ASN terkait dokumen laporan pertanggungjawaban	Mempengaruhi Kualitas Laporan Pertanggungjawaban yang kurang lengkap
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kualitas layanan administrasi kepegawaian masih belum optimal	ROO25.05.06.10	7	Sekretaris	Kurangnya kesadaran ASN terhadap Dokumen Kepegawaian	Pencapaian hasil kurang maksimal
11	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO25.05.06.11	6	Sekretaris	Keterbatasan SDM	Pencapaian hasil kurang maksimal
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO25.05.06.12	6	PPTK	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	ROO25.05.06.13	10	Sekretaris	Keterbatasan anggaran	Pencapaian hasil kurang maksimal
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum optimalnya kinerja terkait tugas yang telah ditetapkan	ROO25.05.06.14	7	Sekretaris	Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran dalam melaksanakan tugas	Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sarana dan prasarana kurang memadai	ROO25.05.06.15	11	Sekretaris	Kurangnya kesadaran ASN dalam memelihara sarana dan prasarana kantor	Mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah